

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ATAS PEMAKAIAN KENDARAAN SEWA
OLEH PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

NANIEK RIFA

NIM. 980903101009

Pembimbing :

Drs. H. HUMAIDI, SU

NIP. 130 261 662

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2001

Asal	Hadiah	Klasifikasi
	Pembelian	
Terima Tanggal	12/11/01	336.2
No. induk	10235824	RIF
		P

5
W

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

N a m a : NANIEK RIFA
N I M : 980903101009
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh
PASAL 23 ATAS PEMAKAIAN
KENDARAAN SEWA OLEH
PT.TELKOM KANDATEL JEMBER

Jember, 9 April 2001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Drs. H. HUMAIDI, SU

NIP. 130 261 662

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : NANIEK RIFA
NIM : 980903101009
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh Pasal 23
ATAS PEMAKAIAN KENDARAAN SEWA
OLEH PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

Hari : Senin
Tanggal : 16 April 2001
Jam : 16.00 – 17.00
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota



Drs. H. BUDIYONO, M.Si
NIP. 131 832 304

Ketua,



Drs. H. HUMAIDI, SU
NIP. 130 261 662

**Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan**



**Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832**

PERSEMBAHAN

- Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan secara moral maupun spiritual serta doa demi keberhasilan dan kesuksesan ananda.
- Paklik dan Buklik tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan laporan ini.
- Adik-adikku Reky dan Ita tersayang yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan.
- Sobatku Kumala yang telah menemaniku baik suka maupun duka.
- Teman-temanku “ Shady Girls ” terima kasih atas kekompakan dan kebersamaan kita selama ini karena kalian sangat berarti bagiku.
- Teman-temanku kost di Bangka II/22, mbak yiyin, mbak titin, ida, efi, dan mbak firmin yang selama ini membantuku.
- Teman-temanku Diploma III Perpajakan khususnya angkatan 1998.
- Almamaterku Tercinta.

MOTTO

“ Bayarlah Pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna.”

(Berita Pajak, No. 1391 Maret XXXI)

“ Janganlah kamu terlalu menyesali terhadap kegagalan yang telah kamu alami dan janganlah terlalu gembira terhadap kesuksesan yang telah kamu capai, Allah tidak menyukai kepada orang yang sombong dan bersikap angkuh.”

(Q.S. Al. Hadid : 23)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “ **PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMAKAIAN KENDARAAN SEWA OLEH PT. TELKOM KANDATEL JEMBER.**”

Penulisan laporan ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselesainya laporan ini kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Sasongko, MSi, selaku Ketua Jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Sutrisno, MSi, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan pengarahan dan memantau kegiatan belajar penulis semenjak menjadi mahasiswa.
5. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, selaku Dosen Pembimbing, atas segala waktu dan bimbingannya yang telah diberikan selama penulisan laporan ini.
6. Bapak Budiarto M. Utomo, selaku Ass. Manager Sumber Daya Manusia (SDM) KANDATEL Jember yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Kodrat, Bapak M. Noor Hidayat beserta seluruh Staf Dinas Keuangan yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

8. Rekan-rekan Diploma III Perpajakan khususnya angkatan 1998 yang telah banyak membantu dalam memberikan semangat dan dorongan.

Semoga bantuan, bimbingan dan pengarahan, semangat serta dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangannya. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dalam menghasilkan laporan yang lebih baik.

Akhirnya besar harapan penulis semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca maupun khasanah ilmu pengetahuan.

Jember, April 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek kerja Nyata	3
1.3 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	5
2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT.TELKOM	5
2.2 Visi dan Misi PT.TELKOM INDONESIA	8
2.2.1 Visi PT. TELKOM	8
2.2.2 Misi PT. TELKOM	9
2.3 Struktur Organisasi PT.TELKOM	9

2.4	Job Description Dinas Keuangan	14
2.4.1	Pengelolaan Anggaran dan Kas.....	14
2.4.2	Pengelolaan Akuntansi.....	16
III.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	18
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	18
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan PT. TELKOM Kandatel Jember dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya	21
3.2.1	Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Atas Pemakaian Kendaraan Sewa oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.....	22
3.2.2	Tata Cara Pembayaran Sewa Kendaraan Bermotor Kepada Kopegtel Camar Jember	25
3.2.3	Saran.....	25
IV.	PENUTUP.....	27
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT. TELKOM Kandatel Jember
2. Struktur Organisasi Dinas Keuangan PT. TELKOM Kandatel Jember



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengisi pembangunan pemerintah berusaha keras untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang merata, bertahap, terencana dan terarah. Agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dibutuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat secara aktif, juga dana yang cukup besar yang dapat diperoleh pemerintah dari berbagai sumber penerimaan baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.

Sumber penerimaan dari luar negeri umumnya berupa pinjaman yang berfungsi sebagai penunjang dana pembangunan. Pemerintah akan mengurangi pinjaman luar negeri tersebut karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk dapat menggali dana yang sebesar-besarnya dari dalam negeri secara efektif dan seoptimal mungkin dan berusaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri yang paling dominan adalah dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat pada RAPBN Tahun 1999 / 2000 dimana sektor pajak selalu menduduki peringkat pertama dalam hal penerimaan. Untuk itulah pemerintah membuat kebijakan baru dibidang perpajakan guna menempatkan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Sumber pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pajak yang berasal dari negara sendiri dan dari masyarakat. Sumber pajak dari negara berasal dari Perusahaan-perusahaan Negara (BUMN), sedangkan dari masyarakat berasal dari Badan-badan Usaha yang dikelola oleh pihak Swasta.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil Pembangunan Nasional dan Globalisasi diberbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang. Pada dekade belakangan terdapat indikasi bahwa pajak yang berasal dari masyarakat cenderung

meningkat lebih pesat daripada yang berasal dari negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut sejumlah BUMN telah melakukan *Go Publik* untuk meningkatkan kinerjanya.

PT. TELKOM INDONESIA Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Telekomunikasi dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah *Go Publik*. Ini berarti membuka peluang kepada masyarakat untuk memiliki dan menguasai Faktor-faktor Produksi yang tadinya hanya bisa dikuasai oleh negara. Dengan penguasaan Faktor-faktor Produksi tersebut PT. TELKOM telah memperoleh banyak keuntungan yang berarti pendapatan negara terutama dari pajak senantiasa terus meningkat.

PT. TELKOM Kandatel Jember merupakan salah satu perusahaan yang memberikan Pelayanan Jasa khususnya dibidang Komunikasi pada konsumen. Dalam perkembangannya PT. TELKOM Kandatel Jember mempunyai pemakai dan pelanggan yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Untuk menunjang kegiatan operasinya PT. TELKOM Kandatel Jember sebagai BUMN, tidak menutup diri untuk melakukan kerjasama dengan siapapun baik itu pihak Swasta maupun sesama BUMN. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember adalah melakukan kerjasama dengan *Kopegtel Camar Jember*. Kerjasama tersebut dalam hal penyewaan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh *Kopegtel Camar Jember*.

Dari uraian di atas, alasan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. TELKOM Kandatel Jember adalah ingin mengetahui sejauh mana sistem perpajakan yang berlaku di PT. TELKOM Kandatel Jember khususnya dalam hal pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas pemakaian kendaraan sewa dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah alasan penulis mengangkat judul laporan tentang **“PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMAKAIAN KENDARAAN SEWA OLEH PT. TELKOM KANDATEL JEMBER.”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 23 di PT. TELKOM Kandatel Jember.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya antara pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan khususnya pasal 23 secara teori dengan pelaksanaan pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Sebagai sarana penulis untuk meningkatkan ketrampilan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan khususnya pasal 23.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja penulis secara langsung khususnya yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
- c. Mencari pengalaman dan memperdalam pengetahuan perpajakan penulis beserta aplikasinya di PT. TELKOM Kandatel Jember.
- d. Dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penulisan laporan sebagai syarat menyelesaikan Program Studi DIII Perpajakan.

1.3 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

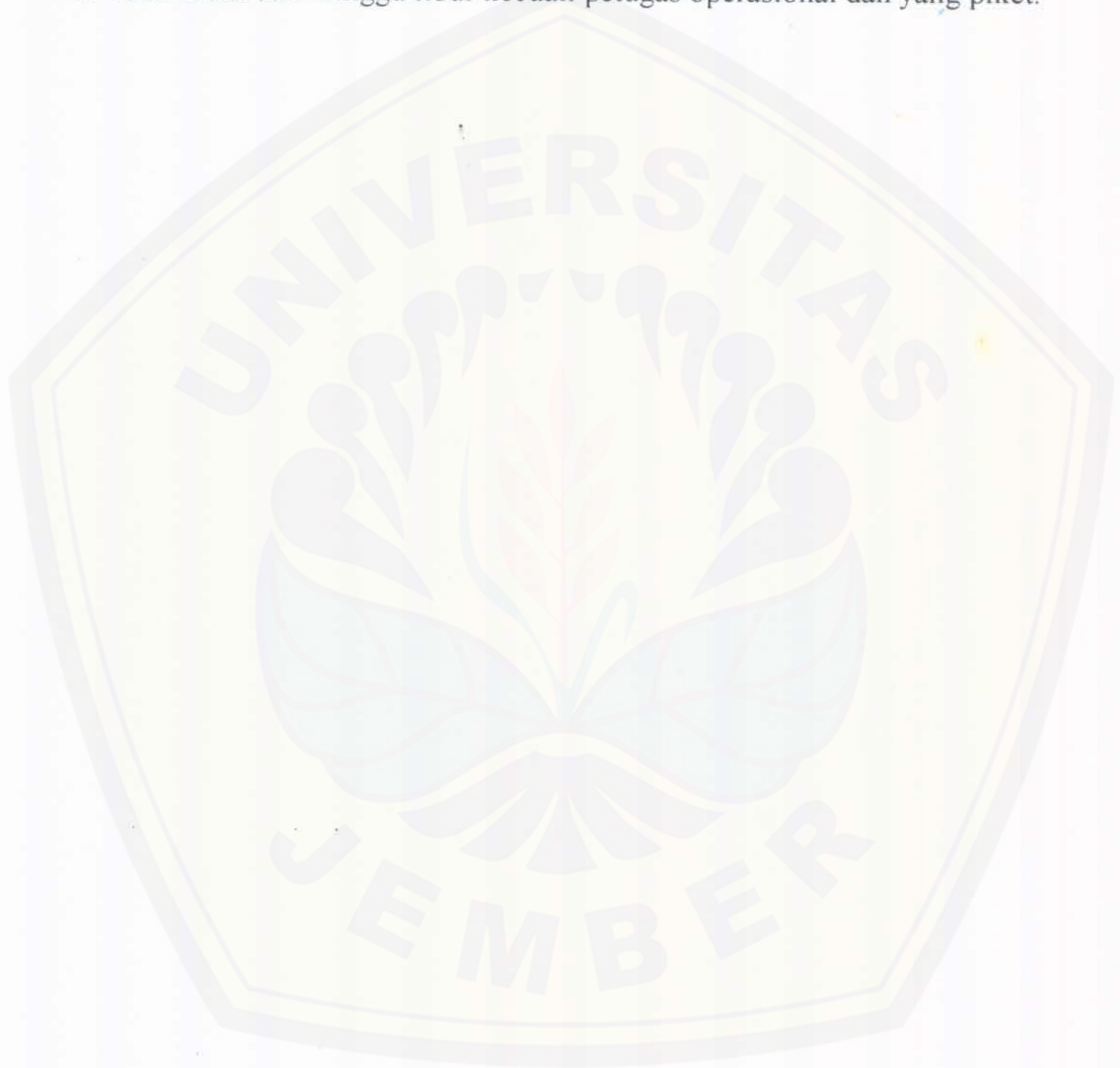
Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. TELKOM Kandatel Jember, Jl. Gajah Mada No.182-184 Jember.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagaimana yang telah ditetapkan Fakultas yaitu minimal selama 144 jam efektif terhitung sejak mulai masuk dan melaksanakan Praktek Kerja Nyata sampai selesai. Praktek Kerja yata mulai bulan Februari – Maret.

Adapun jam kerja yang dilaksanakan :

- a. Hari senin s/d kamis mulai jam 07.30 WIB – 16.30 WIB, istirahat jam 11.30 WIB – 12.30 WIB;
- b. Hari jumat mulai jam 07.30 WIB – 17.00 WIB, istirahat jam 11.30 WIB – 13.00 WIB;
- c. Hari sabtu dan minggu libur kecuali petugas operasional dan yang piket.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1. Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. TELKOM

PT. TELKOM INDONESIA Tbk atau dikenal dengan TELKOM adalah suatu badan usaha yang memiliki sejarah panjang. Berawal dari *Post en Telegrafdienst* sebuah perusahaan swasta yang menyelenggarakan Jasa-jasa Pos dan Telekomunikasi yang didirikan dengan Staatsblad No.52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi oleh swasta ini berlangsung sampai tahun 1906 dan sejak saat itu di ambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan kepada Staatsblad No.395 tahun 1906. Sejak saat itu berdirilah *Post, Telegraaf en Telefoondients*, atau disebut PTT Dienst yang pada tahun 1927 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara Pemerintah Hindia Belanda.

Jawatan PTT berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 tahun 1960, yang menetapkan Jawatan PTT untuk tetap menjadi Perusahaan Negara. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.240 tahun 1961 Perusahaan Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN. Pos dan Telekomunikasi menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1965 dibentuk PN. Pos dan Giro dan dengan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1965 didirikan PN. Telekomunikasi.

Kemajuan Teknologi dan jasa telekomunikasi mendorong Pemerintah untuk meningkatkan bentuk Perusahaan PN. Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan Umum Telekomunikasi yang populer dengan sebutan PERUMTEL. Dalam peraturan tersebut, PERUMTEL dinyatakan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun

luar negeri. Pada saat itu, hubungan telekomunikasi luar negeri juga diselenggarakan oleh PT. Indonesian Satellite Corporation (INDOSAT) yang saat itu berstatus Perusahaan Asing, bagian dari *American Cable & Radio Corporation*, sebuah perusahaan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Seluruh saham PT. INDOSAT dengan modal asing tersebut, pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980, yang isinya tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara Telekomunikasi dalam negeri dan INDOSAT sebagai penyelenggara telekomunikasi jasa luar negeri.

Memasuki Repelita V yaitu mulai tahun 1989 Pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum (Perum) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 tahun 1969. Sejak itu berdirilah Perusahaan Perseroan (PERSERO) Telekomunikasi Indonesia dengan sebutan PT. TELKOM.

Perubahan di lingkungan PT. TELKOM juga terus berlangsung, seperti perubahan bentuk perusahaan sejak dari Jawatan, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (PERSERO) sampai menjadi perusahaan yang semula menjadi monopoli Pemerintah secara berangsur diberlakukan Privatisasi penyelenggaraan telekomunikasi. Kalau ditelaah, perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan.

Perubahan besar-besaran terjadi pada tahun 1995, meliputi (1) *Restrukturisasi Internal*; (2) Kerjasama Operasi; (3) *Initial Publik Offering* (IPO). *Restrukturisasi Internal* dimaksudkan untuk menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi efisien dan efektif, karena terjadi pemisahan antara bidang usaha utama (*core business*); bidang usaha terkait dan bidang usaha penunjang. Bidang usaha utama PT. TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri. Bidang usaha

terkait adalah penyelenggaraan jasa yang masih terkait dengan jasa telekomunikasi seperti jasa system telepon bergerak seluler (STBS), sirkuit langganan, teleks, penyewaan transponder satelit, VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) dan jasa nilai tambah tertentu. Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan PT. TELKOM dan sebagian diselenggarakan dengan membentuk perusahaan patungan. Sedangkan bidang usaha penunjang adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang usaha utama dan bidang usaha terkait. Yang termasuk bidang usaha penunjang adalah pelatihan, sistem informasi satelit, properti, dan riset teknologi informasi.

Sebagai hasil restrukturisasi, sejak 1 Juli 1995 organisasi PT. TELKOM terdiri dari 7 (tujuh) Divisi Regional dan 1 (satu) Divisi Network yang ke duanya mengelola bidang usaha utama. Divisi Regional ini menjadi pengganti struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) yang memiliki daerah teritorial tertentu, namun hanya menyelenggarakan jasa telepon lokal dan mendapat bagian dari jasa telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Sambungan Langsung Internasional (SLI) melalui Perhitungan Interkoneksi.

Divisi Regional PT. TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang di bagi sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, Sumatra;
2. Divisi Regional II, Jakarta dan Sekitarnya;
3. Divisi Regional III, Jawa Barat;
4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Divisi Regional V, Jawa Timur;
6. Divisi Regional VI, Seluruh Kalimantan;
7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor-Timur, Maluku dan Irian Jaya.

Untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan dibentuk Unit Sistem Informasi (SISFO) berdasarkan Keputusan Kadivreg V Jawa Timur No : tel.1792/PS150/RES-52/96. Pembentukan unit SISFO ini bukan berarti teknologi

informasi baru diperkenalkan dan diterapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIMAK) Terpadu. Pada bulan Agustus 1996 diterapkan *System Online Payment Point* (SOPP) adalah suatu cara dalam membayar langganan telepon yang bisa dibayarkan dimana saja. Sistem ini berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Perkembangan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT. TELKOM, mulai tanggal 31 Desember 1996, PT. TELKOM menambah dua Divisi, yaitu Divisi Multimedia dan Divisi Pembangunan. Divisi Multimedia yang mengelola Jasa Multimedia dan Network Provider dimaksudkan sebagai pengelola bisnis utama, sedangkan Divisi Pembangunan termasuk Divisi Penunjang.

Kerjasama operasi dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanaannya, maka PT. TELKOM mengikutsertakan swasta dalam pembangunan prasarana jaringan, penyediaan jasa-jasa khusus dan pelaksanaan operasinya. Sedangkan *Initial Public Offering* (IPO) dimaksudkan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri dengan cara menjual saham PT. TELKOM. Saham yang dikeluarkan PT. TELKOM terdiri dari saham A seri Dwiwarna dan saham seri B. Saham seri A Dwiwarna jumlahnya hanya 1 (satu) lembar dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Sedangkan saham seri B adalah atas nama dan dapat dipindah tangankan.

2.2 Visi dan Misi PT. TELKOM INDONESIA

2.2.1 Visi PT. TELKOM

PT. TELKOM berupaya untuk mewujudkan diri sebagai Perusahaan InfoCom yang memimpin dikawasannya. Hal ini mengandung maksud bila PT. TELKOM di-*benchmark* dengan rata-rata *emerging Telco* di Asia, PT. TELKOM memiliki *value* perusahaan InfoCom yang sejajar atau minimal mampu meminimalisasi kesenjangannya sehingga pada tahun 2004 PT. TELKOM dapat disejajarkan atau dibandingkan (*comparable*) dengan rata-rata *emerging Telco* di Asia.

“*To Become a Leading InfoCom Company in the Region*” merupakan Visi PT. TELKOM, artinya bahwa dalam menghadapi persaingan bebas PT. TELKOM bertekad menjadi pemimpin (*leader*) dalam perkembangan dunia usaha dibidang Informasi dan Telekomunikasi untuk kawasan Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Untuk mencapai visi tersebut maka PT. TELKOM menerapkan ISO (*Internasional Standart Organisation*) yang menjamin setiap proses kerja yang ada di PT. TELKOM menjadi berkualitas berdasarkan ISO 9001 versi 2000 yang diaplikasikan melalui TQM (*Total Quality Management*) untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, karyawan, dan pemilik perusahaan dengan standar perusahaan kelas dunia (*WCO/World Class Operator*).

2.2.2 Misi PT. TELKOM

PT. TELKOM Indonesia mempunyai misi yaitu menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum dengan menyelenggarakan penyediaan dibidang jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang, misalnya pelayanan jasa telekomunikasi dan informasi. Serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan umum. Dibidang ekonomi misalnya melalui pajak, penyediaan tenaga kerja, penyediaan sarana umum contohnya penyediaan telepon koin dan telepon kartu. Dibidang pembangunan umum, dengan meningkatnya jumlah pajak yang disetor PT. TELKOM berarti penerimaan negara juga meningkat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar.

2.3 Struktur Organisasi PT. TELKOM

Bagi suatu kegiatan usaha atau perusahaan diperlukan suatu organisasi yang baik, baik itu perusahaan kecil atau besar. Semakin besar kegiatan usaha atau perusahaan maka semakin sulit persoalan organisasi yang akan dihadapi begitu pula sebaliknya. Semakin mudah persoalan mengenai organisasi maka perusahaan dapat

dengan mudah menentukan jalan aktivitas usahanya selain itu juga biaya yang dikeluarkannya relatif sedikit.

Bentuk organisasi PT. TELKOM Indonesia adalah bentuk organisasi garis dan staff. Seorang General Manager dibantu oleh seorang Deputy General Manager dan Deputy General Manager sendiri dibantu oleh beberapa manager. Dari bagian itu masih terdiri lagi dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerjasama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Organisasi itu merupakan suatu sistem yang saling terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain harus saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas, karena tidaklah mungkin suatu organisasi itu dapat berhasil kalau antar bagian tidaklah saling membantu dan bekerjasama.

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. General Manager Kandatel (Kantor Daerah Telkom)
 - a. Menangani tugas yang bersifat strategik
 - b. Menangani tugas-tugas yang berorientasi keluar maupun kedalam
 - c. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasional
 - d. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa dan pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area geografis tertentu.
2. Deputy General Manager Kandatel (Kantor Daerah Telkom)
Berperan dan bertanggung jawab sebagai pimpinan operasional.
3. Manager Kancatel (Kantor Cabang Telkom)
Merupakan unit kerja Kandatel yang bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan, operasi dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi beserta sarana penunjangnya pada lokasi yang relatif terpisah dari Kandatel.
4. Manager Marketing
 - a. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi.
 - b. Merencanakan penjualan dan promosi.

- c. Mengelola *usage* (pemakaian pulsa) dan produksi.
- d. Mengelola pelayanan umum.

Manager Marketing membawahi :

- a. Ass. Manager Sales & Promotion
 - b. Ass. Manager Usage & Produksi
 - c. Ass. Manager Public Service
5. Manager Ophar Jar Akses (Operasi Harian Jaringan Aktif)
- a. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasi dan pemeliharaan jaringan kabel (jarkab).
 - b. Menganalisa, mengevaluasi dan peningkatan kinerja jarkab serta peningkatan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia).
 - c. Merencanakan anggaran dan rehabilitasi serta menggambarkan jaringan kabel.
 - d. Menyelenggarakan tata usaha dan logistik untuk menunjang pengoperasian dan pemeliharaan jaringan kabel dan pengelolaan SSKA (Sistem Akuntansi Customer).
 - e. Mengoperasikan pemeliharaan dan perbaikan jaringan kabel.

Manager Ophar Jar Akses membawahi :

- a. Ass. Manager Sektor
 - b. Ass. Manager Operasi & Manager Akses Corp Customer
 - c. Ass. Manager Akses Non Metal
 - d. Ass. Manager Operation Control
6. Manager Perencanaan Bisnis
- a. Membantu General Manager dalam menyusun Business Plan Kandatel dan Kancatel.
 - b. Menyusun dan menganalisa lingkungan luar.
 - c. Menyusun dan menganalisa kapabilitas internal.
 - d. Menyediakan rumusan strategik, kebijakan dan program-program operasi, tehnik, pelayanan, pemasaran, pengembangan usaha, Investasi dan pengendalian kinerja Kandatel dan Kancatel.

- e. Menyusun dan mengendalikan mutu, kendali, kepastian mutu TQM (*Total Quality Management*) Kandatel dan Kancatel.
- f. Menyusun dan menjaga bisnis proses Kandatel dan Kancatel.
- g. Menyelenggarakan fungsi manajemen umum lainnya.

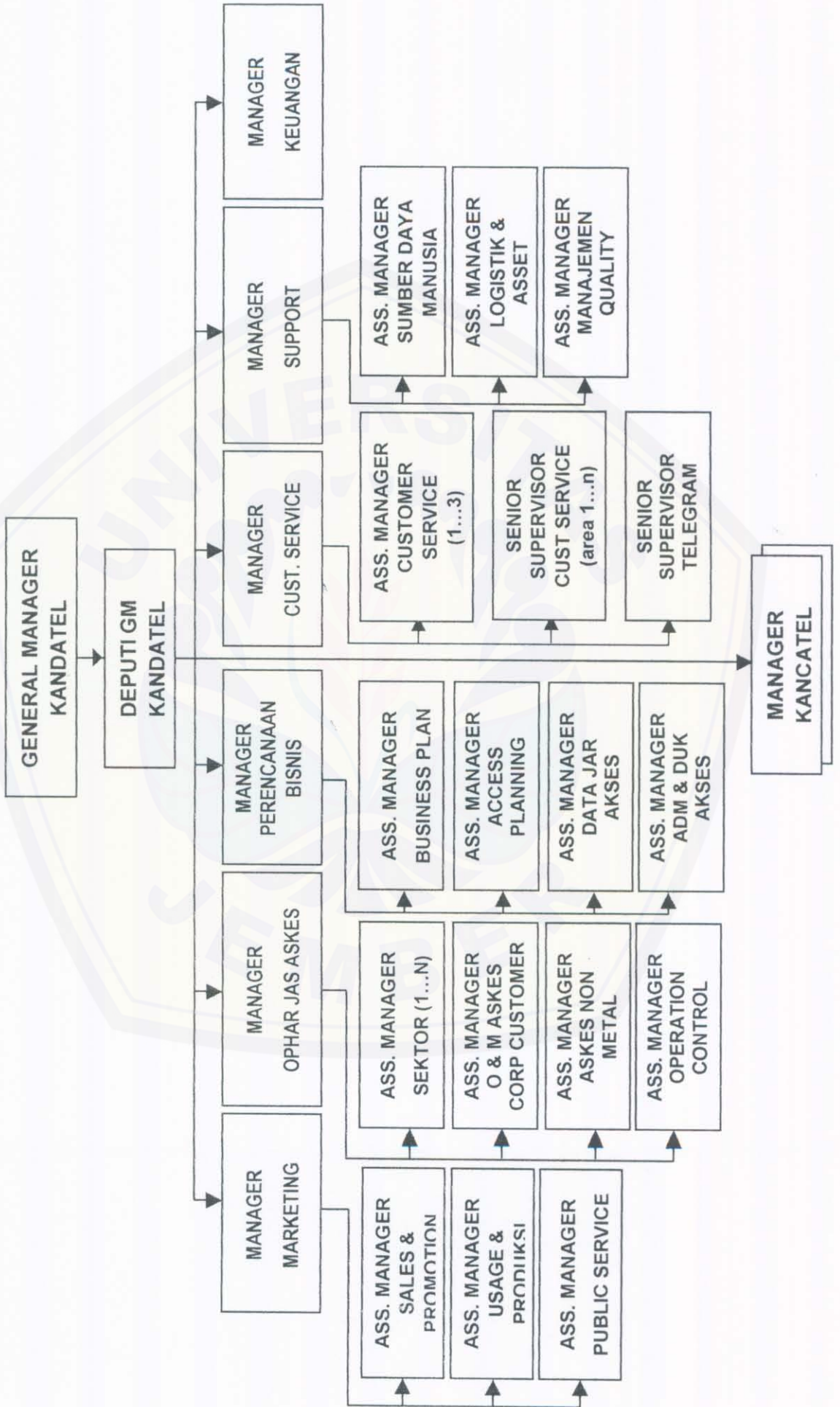
Manager Perencanaan Bisnis membawahi :

- a. Ass. Manager Business Planning
 - b. Ass. Manager Access Planning
 - c. Ass. Manager Data Jaringan Akses
 - d. Ass. Manager Adm & Dukungan Akses
7. Manager Customer Servis membawahi :
- a. Ass. Manager Customer Servis
 - b. Senior Supervisor Cust Servis
 - c. Senior Supervisor Telegram
8. Manager Support
- a. Penyediaan dukungan pada unit kerja Kandatel dalam perencanaan, pendayagunaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, Logistik dan kualitas.
 - b. Melaksanakan administrasi SDM (Sumber Daya Manusia).
 - c. Mengelola Belanja dan data pegawai.
 - d. Membina perencanaan dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia).

Manager Support membawahi :

- a. Ass. Manager SDM
 - b. Ass. Manager Logistik & Asset
 - c. Ass. Manager Manajemen Quality
9. Manager Keuangan
- a. Merencanakan dan menyediakan dukungan financial kepada unit-unit di Kandatel.
 - b. Menyelenggarakan sistem akuntansi.
 - c. Mengelola Perbendaharaan.
 - d. Mengelola anggaran dan kas.

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI
KANDATEL JEMBER



2.4 Job Description Dinas Keuangan

Dinas keuangan mempunyai tugas merencanakan dan menyediakan dukungan kepada unit-unit di KANDATEL serta menyelenggarakan sistem akuntansi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Struktur Organisasi bagian keuangan dapat dilihat pada gambar 2.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian keuangan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan Anggaran dan Kas
2. Pengelolaan Akuntansi

2.4.1 Pengelolaan Anggaran dan Kas

a. Pengelolaan Anggaran

1) Investasi

- (a) Melaksanakan pengisian data pada KPA (Kartu Pengawasan Anggaran) untuk investasi.
- (b) Melaksanakan PDRK (Perubahan Daftar Rencana Kerja).
- (c) Melaksanakan pembuatan Laporan Investasi.

2) Beban

- (a) Melaksanakan pengisian data pada KPA (Kartu Pengawasan Anggaran) untuk beban.
- (b) Melaksanakan PDRK (Perubahan Daftar Rencana Kerja).
- (c) Melaksanakan pembuatan Laporan Beban.
- (d) Melaksanakan penyusunan Anggaran Beban.

3) Pendapatan

Melaksanakan pembuatan Laporan Pendapatan.

4) Lain-lain

- (a) Menyusun GKM (Gugus Kendali Mutu).
- (b) Membuat Laporan WCO (*World Class Operation*).
- (c) Membuat *Financial Report* (laporan keuangan).
- (d) Mencatat biaya-biaya yang masih harus dibayar .

(e) Menyusun ABC (*Activity Basic Costing*).

(f) Menyiapkan *Budget Committee*.

b. Pengelolaan Kas

1) Pendapatan/*Cash in Flow*

(a) Melaksanakan validasi CN (*Credit Nota*) dengan *Cash Desk* secara harian.

(b) Melaksanakan validasi SSKA (sistem akuntansi customer) dengan KA/GL 3100 secara periodik.

(c) Melaksanakan Pengawasan Cash :

(1) Pengawasan *Cash Intransit* secara periodik

(2) Pengawasan *Cash Transfer* ke *Cooperate* secara harian

(d) Melaksanakan rekonsiliasi bank.

(e) Melaksanakan entry pendapatan dan titipan serta validasi entry.

2) Beban/*Cash out Flow*

(a) Melaksanakan entry beban dan panjar serta validasi entry.

(b) Pengelolaan *Imprest Fund*

(1) *Cash Opname* (perhitungan antara fisik dengan yang ada di buku).

(2) *Reimburse* (penagihan kembali).

(3) Saldo Optimal (saldo maksimal yang boleh disimpan dalam brankas).

(4) Pengambilan uang di Bank

(c) Permintaan dropping

(1) Komparasi realisasi anggaran atas permintaan dropping

(d) Melaksanakan transfer pembayaran ke pihak III.

(e) Melaksanakan *Zero Cash Balance*.

(f) Melaksanakan validasi *Collection Fee*.

3) Hutang

(a) Melaksanakan entry pembayaran hutang dan validasi secara harian.

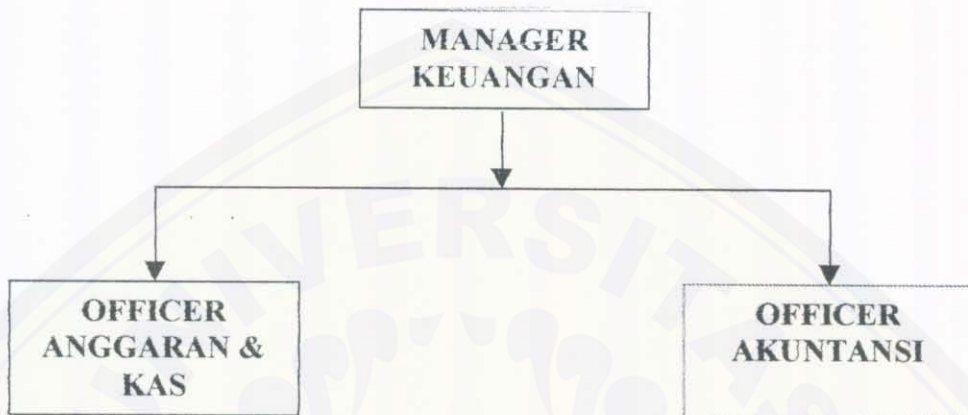
- (b) Melaksanakan validasi saldo hutang.
- 4) Pajak : PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, PM (Pajak Masukan) & PK (Pajak Keluaran), PPN Pengadaan
 - (a) Menjamin pelaksanaan system perpajakan dapat dilaksanakan di Kandatel sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (b) Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai Wajib Pajak (WP).
 - (c) Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai Wajib Pungut (Wapu).
 - (d) Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 5) Lain-lain
 - (a) Melaksanakan verifikasi dokumen/surat bukti.
 - (b) Pembuatan SPB (Surat Perintah Bayar).
 - (c) Pembuatan Laporan Cash Flow.

2.4.2 Pengelolaan Akuntansi

- a. Entry harian
 - 1) Pengakuntansian *Fixed Asset*.
 - 2) Melaksanakan *interface* modul inventori.
 - 3) Melaksanakan *interface* modul *Payroll*.
 - 4) Melaksanakan entry modul *General Ledger*.
- b. Melaksanakan validasi *General Ledger Jurnal Detail*.
- c. Melaksanakan posting
- d. Pencetakan laporan keuangan :
 - 1) Neraca Saldo/Neraca Percobaan
 - 2) Buku Besar
 - 3) Neraca/Rugi-Laba
- e. Menyusun Laporan penutupan buku untuk triwulanan (sebagai bahan audit).

GAMBAR 2

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEUANGAN
PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**



Sumber data : PT.TELKOM Kandatel Jember Th. 2001

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Secara umum didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal, baik itu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, maupun industri. Perkembangan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasinya. Sama halnya dengan PT. TELKOM Kandatel Jember yang telah banyak menerima keuntungan dari bidang penjualan jasa maka kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember banyak macamnya.

Prosedur kerja dalam hal pengendalian proses administrasi beban pajak terutama mengenai pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan bermotor (KBM) dengan tujuan agar proses administrasi beban pajak terlaksana dalam kondisi yang terkendali, sehingga informasi yang dihasilkan tepat waktu dan akurat.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. TELKOM Kandatel Jember adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan kerja dibidang Keuangan yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung dibagian Keuangan unit kerja bidang Perpajakan, sehingga dapat menerapkan teori yang diterima selama kuliah.

Dengan mengacu pada hal di atas maka kegiatan penulis selama Praktek Kerja Nyata di PT. TELKOM Kandatel Jember adalah sebagai berikut :

**JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
PADA DINAS KERJA KEUANGAN
PT. TELKOM KANDATEL JEMBER
JL. Gajah Mada No.182-184**

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
1.	Minggu ke 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan Praktek Kerja Nyata oleh Bapak Marjoko selaku Manager Keuangan sekaligus perkenalan dengan para karyawan dan karyawanati Bagian Keuangan. • Konsultasi perencanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata selanjutnya dengan Pembimbing obyek Praktek Kerja Nyata yang sudah ditentukan oleh Bagian Keuangan. • Mendapat pengarahan dan penjelasan tentang Administrasi yang ada dibagian Keuangan.
2.	Minggu ke 2	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat penjelasan mengenai : Sejarah Perusahaan, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas tiap Departemen. • Mendapat penjelasan mengenai prosedur dan pelaksanaan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.

		<ul style="list-style-type: none">• Diskusi tentang pengajuan judul laporan Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan perpajakan.• Entry data ke. Komputer tentang Bukti Potong untuk Rekanan PT TELKOM Kandatel Jember.• Mendapat penjelasan mengenai pengisian SSP dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.
3.	Minggu ke 3	<ul style="list-style-type: none">• Mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan judul yang diangkat.• Entry data ke Komputer tentang Bukti Potong untuk Rekanan (Kopegtel Camar Jember) PT. TELKOM Kandatel Jember mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemakaian Kendaraan Sewa.• Mengecek kembali antara pajak yang dipotong dengan yang telah disetor setiap bulan sebagai upaya menghindari terjadinya selisih pajak.
4.	Minggu ke 4	<ul style="list-style-type: none">• Mengajukan laporan akhir untuk direvisi oleh Pembimbing dari PT. TELKOM untuk mendapatkan persetujuan.• Pelepasan Praktek Kerja Nyata dari PT. TELKOM Kandatel Jember dan mengucapkan terima kasih atas

		dukungannya selama Praktek Kerja Nyata kepada para karyawan dan karyawan di bagian Keuangan.
--	--	--

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. TELKOM Kandatel Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya.

PT. TELKOM Kandatel Jember merupakan salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan jasa khususnya dibidang komunikasi pada konsumen. Banyak sekali jenis pelayanan yang diberikan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember kepada pelanggan (konsumen), misalnya saja pelayanan Pasang Telepon Baru (PSB), pelayanan Nadasela, Japati, Memo, Lacak, Permata (Pertemuan Melalui Telepon Anda), dan masih banyak lagi. Mengingat sangat pentingnya komunikasi maka PT. TELKOM Kandatel Jember memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada pelanggan (konsumen). Dalam pelaksanaan penjualannya, PT. TELKOM Kandatel Jember tidak lepas dari adanya berbagai masalah salah satunya adalah dibutuhkannya sarana untuk menunjang kegiatan operasinya dalam hal pemasangan jaringan telepon baru dari rumah ke rumah.

Untuk mengatasi keterbatasan sarana penunjang operasional jaringan maka pada tanggal 31 Maret 1997 dengan No. Kontrak : TEL.136/HK.810/RE5-D11/1997 PT. TELKOM Kandatel Jember mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan *Kopegtel Camar Jember*. Dari Perjanjian tersebut telah disepakati bahwa PT. TELKOM Kandatel Jember dan *Kopegtel Camar Jember* menyatakan mengikat diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sewa Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 untuk KANDATEL Jember. Dan pada tanggal 08 Maret 1999 sesuai dengan No. Kontrak/PKS : TEL.90/HK.820/RE5-D504/1999 kedua belah pihak sepakat mengadakan *Amandemen* untuk mengadakan

perubahan ketentuan dalam Perjanjian sebelumnya. Ini dikarenakan adanya kenaikan biaya sewa kendaraan satu tahun dan adanya perubahan volume pekerjaan.

3.2.1 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Atas Pemakaian Kendaraan Sewa Oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.

Dari adanya Perjanjian Kerja Sama Sewa Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 itu telah timbul kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember. Kewajiban perpajakan atas pemakaian kendaraan sewa pada mulanya hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) saja tetapi pada akhir Juni 2000 pemakaian kendaraan sewa juga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, Ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-176 / PJ/ 2000 Tanggal 26 Juni 2000 yang diteruskan dengan Nota Dinas VP Akuntansi Nomor : C. TEL. 64 / KU320 / KUG-34 / 2000 Tanggal 11 Juli 2000. Dan PT. TELKOM Kandatel Jember baru bisa menerapkan peraturan perpajakan yang baru ini pada pertengahan Juli. Jadi pemakaian kendaraan sewa ini telah dikenakan pajak ganda selain dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), juga dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Sedangkan penulis hanya membahas pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan judul yang diangkat.

Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. TELKOM Kandatel Jember sama dengan mekanisme pemotongan pajak di PKP (Pengusaha Kena Pajak) lainnya. Pelaksanaan pemotongan ini dilakukan oleh Bendaharawan PT. TELKOM Kandatel Jember yang juga harus melaksanakan penyetoran dan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 PT. TELKOM Kandatel Jember ditunjuk sebagai Pemotong dan Penyetor Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Sebagai Wajib Pajak Badan yang taat pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemakaian Kendaraan Sewa adalah sebesar 15 % dari perkiraan penghasilan netto. Perkiraan penghasilan netto yang digunakan sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 40% dihitung dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jadi Tarif Pajak : $15\% \times 40\% \times 100/110$ (DPP) X Jumlah Bruto. DPP adalah Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi : jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dalam hal ini DPP (Dasar Pengenaan Pajak) untuk sewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT.TELKOM adalah sebesar 100/110 dan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) ini sudah merupakan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemakaian Kendaraan Sewa dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember. Pemotongan ini disertai dengan Bukti Pemotongan berupa :
 - a. Lembar 1 untuk *Kopegtel Camar Jember* (Rekanan).
 - b. Lembar 2 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - c. Lembar 3 Arsip untuk PT. TELKOM Kandatel Jember.
3. Penyetoran / Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. TELKOM Kandatel Jember dengan cara mentransfer uang ke Kantor Pos Cabang Jember lewat via Bank BNI dengan SSP langsung ke Kantor Kas Negara (karena Pos dan PT. TELKOM ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tentang Penyetoran Pajak). Penyetoran ini paling lambat tanggal 10 bulan $n + 1$ dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan cara mengisi secara lengkap dan benar SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 rangkap 2 (dua), disertai dengan lampiran, berupa :
 - a. Lembar ke-3 SSP Bukti Setoran Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - b. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - c. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan.



Pelaporan Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT Masa) ke Kantor Pelayanan Pajak Jember, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan $n + 1$, apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

5. Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemakaian kendaraan sewa adalah sebagai berikut :

**HARGA STANDART
SEWA KBM RODA DUA & EMPAT**

NO	JENIS KENDARAAN	JML HARI	HARGA SATUAN (Rp)
1.	KIJANG PICK UP	30	44.000
2.	SEPEDA MOTOR HONDA	30	5.940

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 :

PT. TELKOM Kandatel Jember membayar jasa sewa kendaraan bermotor untuk periode Agustus 1999 sebesar Rp. 11.411.400,- sudah termasuk PPN 10%.

Kendaraan bermotor yang disewa oleh PT. TELKOM Kandatel Jember terdiri dari :

- a. Kijang Pick Up 5 buah
- b. Sepeda Motor Honda 27 buah

Perhitungan PPh Pasal 23 :

Harga Sewa :

- | | | | |
|----|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| a. | Kijang Pick Up | : 5 X 30 hari X Rp.44.000 = Rp. | 6.600.000,- |
| b. | Sepeda Motor Honda | : 27 X 30 hari X Rp. 5.940 = Rp. | 4.811.400,- |
| | Jumlah Sewa termasuk PPN 10% | = Rp. | 11.411.400,- |

Dipotong PPh Pasal 23 sebesar = $15\% \times 40\% \times (100/110 \times \text{Rp. } 11.411.400,-)$
 = Rp. 622.440,

3.2.2 Tata Cara Pembayaran Sewa Kendaraan Bermotor Kepada *Kopegtel Camar Jember*

- Pembayaran jasa sewa kendaraan bermotor oleh PT. TELKOM Kandatel Jember ditransfer sesuai dengan hak *Kopegtel Camar Jember* melalui Bank BNI Cabang Jember dengan nomor rekening yang sudah ditentukan dan atas nama *Kopegtel Camar Jember*. Pembayaran jasa sewa kendaraan bermotor tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23 dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Biaya transfer ditanggung oleh *Kopegtel Camar Jember*.
- Pelaksanaan pembayaran jasa sewa kendaraan bermotor dilakukan setiap bulan.
- Pembayaran jasa sewa kendaraan bermotor akan dilaksanakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember kepada *Kopegtel Camar Jember* dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah diterimanya Surat Tagihan dari *Kopegtel Camar Jember*.
- Surat Tagihan kepada PT. TELKOM Kandatel Jember tersebut harus diajukan oleh *Kopegtel Camar Jember* pada minggu pertama setiap bulan.

3.2.3 Saran

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember sudah cukup baik dan relevan dengan

perkembangan perpajakan dewasa ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah diterapkannya peraturan perpajakan yang baru yaitu tentang pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemakaian Kendaraan Sewa yang sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. PT. TELKOM Kandatel Jember dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mengenai penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemakaian Kendaraan Sewa selalu tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga. Namun demikian untuk masa-masa yang akan datang diharapkan PT. TELKOM Kandatel Jember lebih memperhatikan pada sektor perpajakan karena sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bidang bisnis tidak terlepas pula bahwa peraturan-peraturan dibidang perpajakan juga akan selalu mengikuti perkembangan tersebut. Untuk itulah PT. TELKOM Kandatel Jember perlu menambah tenaga-tenaga perpajakan yang handal sehingga prestasi yang telah dicapai selama ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk tetap menjadi salah satu penyeteror pajak terbesar dinegeri ini, perlu diketahui bahwa penyeteroran pajak yang dilakukan oleh PT.TELKOM kepada Kas Negara bisa mencapai Rp. 2 Milyar setiap bulannya.

IV. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Dengan telah diselesaikannya Praktek Kerja Nyata kami berharap bahwa kegiatan yang telah kami laksanakan dapat membawa manfaat khususnya bagi kami dan semua pihak pada umumnya. Kami menyadari, bahwa ilmu dan pengalaman kami sangat terbatas. Oleh karenanya kami sangat berharap semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata selalu bersedia memberikan saran atau nasehat serta bimbingannya kepada kami, agar kami dapat mempersiapkan diri untuk terjun secara nyata dalam masyarakat. Kami juga menyadari bahwa laporan yang kami tulis masih jauh dari sempurna, karena itu kami menerima segala saran dan kritik serta pengembangan dari topik laporan ini yang dapat bermanfaat bagi semuanya.

Akhirnya laporan ini penulis akhiri dengan ucapan terima kasih kepada KANDATEL Jember atas kesempatan, bantuan, fasilitas dan perhatian yang telah diberikan dengan harapan agar kerja sama ini dapat terus berlanjut dan semoga usaha-usaha PT. TELKOM dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 1999. Perpajakan Edisi 7. Yogyakarta. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2000. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi Offset.
- Waluyo. 1999. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
- Dirjen Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-176 / PJ./ 2000 Tanggal 26 Juni 2000. Tentang Jenis Jasa Lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 10 Tahun 1994.
- Ditjen Pajak. 1999. “ APBN 1999 / 2000 ”. Dalam *Barita Pajak* (Maret XXXI) No.1391. Jakarta.
- , Undang -undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta. Salemba Empat.


TELKOM

tia Melayani Anda

Jember, 13 Desember 2000

Nomer : Tel. *8-13* /PD520/RE/5-502/2000

Kepada Yth.
Sdr. Dekan FISIP (Program D III Perpajakan)
Universitas Jember
Jln.Kalimantan Tegalboto
J E M B E R

Perihal : Ijin Pelaksanaan PKN

Dengan hormat,

Menunjuk Proposal dari **Lisa Dwi Rahayu dkk** dan sesuai dengan kesepakatan antara pihak TELKOM dengan yang bersangkutan yaitu tentang pelaksanaan PKN, pada prinsipnya kami dapat menerima permohonan Saudara dengan ketentuan dapat dimulai pada bulan Pebruari 2001.

Sehubungan dengan hal dimaksud agar diinformasikan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKN bahwa sebelum pelaksanaan PKL dimulai agar menghadap ke Bagian SDM KANDATEL Jember Jln. Gajahmada N0.182 Jember guna melengkapi persyaratannya dengan membawa materai Rp. 6.000,-/peserta.

Demikian disampaikan atas kepercayaan Saudara pada PT.TELKOM kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



IRIANTO MURYONO
KABAG SDM

16-12-2000



Surat Tugas

Nomer : 56/J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No	N a m a	NIM	Keterangan
01	Lisa Dwi Rahayu	98 - 1007	Ketua
02	Naniek Rifa	98 - 1009	Wakil ketua
03	Erna Fuadah	98 - 1015	Anggota
04	Dewi Kumalasari	98 - 1025	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di P.T Telkom Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 FEB 2001

Dekan,



Drs. H. MOCH TOERKI

NIP. 130 524 832

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA DINAS KERJA KEUANGAN
PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

NAMA : NANIEK RIFA
NIM : 980903101009
JURUSAN : PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1.	Senin	19 Februari 2001		
2.	Selasa	20 Februari 2001		
3.	Rabu	21 Februari 2001		
4.	Kamis	22 Februari 2001		
5.	Jum'at	23 Februari 2001		
6.	Senin	26 Februari 2001		
7.	Selasa	27 Februari 2001		
8.	Rabu	28 Februari 2001		
9.	Kamis	1 Maret 2001		
10.	Jum'at	2 Maret 2001		
11.	Selasa	6 Maret 2001		
12.	Rabu	7 Maret 2001		
13.	Kamis	8 Maret 2001		
14.	Jum'at	9 Maret 2001		
15.	Senin	12 Maret 2001		
16.	Selasa	13 Maret 2001		
17.	Rabu	14 Maret 2001		
18.	Kamis	15 Maret 2001		
19.	Jum'at	16 Maret 2001		
20.	Senin	19 Maret 2001		

Jember, 19 Maret 2001

Mengetahui,

ASS. MANAGER SDM

BUDIARTO M. UTOMO

NIK : 651045



Kepada Yth
Sdr Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di J E M B E R

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal.23 yang telah dipotong dan disetor untuk masa
bulan **A G U S T U S** Tahun . 1999 Adalah sebesar **Rp 622.440,-**
(. . Sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah . . .)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal.23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	T a r i f (3)	PPh yang dipotong (4)
1.Bunga (Ine Bunga Kop.)	Rp	15%	Rp
2.Deviden	Rp	15%	Rp
3.Royalti	Rp	15%	Rp
4.Sewa	Rp	15 % X 40 %	Rp
5.Penghasilan sehub.dgn penggunaan harta	Rp	15% X 10 %	Rp
6.Imbalan jasa	Rp 10.374.000,00	15% X 40 %	Rp 622.440,00
7.Hadiah & penghargaan	Rp	15%	Rp
J U M L A H			Rp 622.440,00

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	T a r i f (3)	PPh yang dipotong (4)
1.Bunga	Rp	20%	Rp
2.Deviden	Rp	20%	Rp
3.Royalti	Rp	20%	Rp
4.Sewa	Rp	20%	Rp
5.Penghasilan sehub.dgn penggunaan harta	Rp	20 %	Rp
6.Imbalan jasa	Rp	20 %	Rp
7.Hadiah & penghargaan	Rp	20 %	Rp
8.Penjualan harta di Indonesia	Rp	20 %	Rp
9.Premi Asuransi/Reasuransi	Rp	20 %	Rp
10.Penghasilan kena Pajak BUT	Rp	20 %	Rp
J U M L A H			Rp

C. Lampiran :

1. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal.23 / 26
2. Lembar ke.3 Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Lembar ke.2 Bukti Pemotongan PPH 23/26 sebanyak . . . 1 . . . (. S a t u .) lembar

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar , lengkap dan tidak beryarat.

*) Dlm hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarif disesuaikan

Jember, 17 September 1999

Pemotong Pajak

Nama : PT.TELKOM JEMBER

NPWP : 1.000.013.1.626

Alamat : Jl.Gajah Mada 182-184 Jr

DIISI OLEH KPP

Diterima tgl
Petugas

(.....)
NIP.

KODRAT
NIK : 500059

Keterangan :

Diisi berdasarkan contoh perhitungan PPh Ps.23 atas pemakaian kendaraan sewa.



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Masa : Bulan AGUSTUS

Tahun 1999

Uraian	No. Urut	N P W P	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 23/26 yg dipotong (Rp)	Keterangan
				tanggal	Nomor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. TIDAK FINAL	1	1.235.731.5.626	KOPEGTEL JEMBER	3-8-99	03 /VIII Jr /99	622.440	
JUMLAH A						622.440	
B. FINAL							
JUMLAH B							
JUMLAH A + B							

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 03/VIII/Jr/1999

Nama Wajib Pajak : KOPEGTEL JEMBER
NPWP : 1.235.731.5.626
Alamat : JL. PB. Sudirman NO.7 JEMBER

Penghasilan :	Jumlah	Tarif	PPH yang dipotong
1. Bunga	: Rp.	X 10% X 15%	Rp. 0
2. Dividen	: Rp.	X 10% X 15%	Rp. 0
3. Royalti	: Rp.	X 10% X 15%	Rp. 0
4. Sewa	: Rp.	X 40% X 15%	Rp. 0
5. Imbalan lainnya	: Rp. 10.374.000	X 40% X 15%	Rp. 622.440
	Jumlah		<u>Rp. 622.440</u>

Perhatian : Jember, 03 AGUSTUS 1999

Pemotong Pajak,

Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

Nama : PT. TELKOM

NPWP : 1.000.013.1.626

K O D R A T
NIK. 500059

Keterangan :
Diisi berdasarkan contoh perhitungan PPh Ps.23 atas pemakaian Kendaraan sewa.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

NPWP : *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : KOEGTEL CAMAR JEMBER

Alamat WP : JL.PB.SUDIRMAN NO.7 JEMBER

Kode Pos :

Kode Jenis Pajak (MAP) :

Kode Jenis Setoran :

Uraian Pembayaran *) : PPh Ps.23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I

Setoran : Masa

beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----

beri tanda silang pada kolom bulan setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud :

Nomor Ketetapan : Tahun Final STP SKPKB SKPKBT

/ / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi sesuai pembayaran rupiah penuh*

Rp622.440

Terbilang : (enamratus dua puluh duaribu empatratus empat puluh rupiah)

Diisi dengan huruf

uang Teraan

Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor JEMBER Tgl. 03 Agustus 1999 Cap dan tanda tangan Nama Jelas KODRAT NIK. 500059
--	--

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

2.PDIP.5.1-98

Penjelasan :

Diisi berdasarkan contoh perhitungan PPh Ps.23 atas pemakaian kendaraan sewa.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR **2**
Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : *diisi sesuai kartu NPWP*
Nama WP : KOPEGTEL CAMAR JEMBER
Alamat WP : JL.PB.SUDIRMAN NO.7 JEMBER

Kode Pos :

Kode Jenis Pajak (MAP) :
Kode Jenis Setoran :
Uraian Pembayaran *) : PPh Ps.23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I

Setoran : Masa
tan tanda silang pada kolom yang berkenaan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul **Agst** Sep Okt Nov Des
tan tanda silang pada kolom bulan setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak
setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : Tahun Final STP SKPKB SKPKBT
 / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi sesuai pembayaran rupiah penuh

Rp622.440

Terbilang : *(enamratus.dua.puluh.duaribu.empatratus.empat.puluh.rupiah)*
Diisi dengan huruf

Tempat Teraan
Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Terima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
JEMBER Tgl. 03 Agustus 1999
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas

Nama Jelas **KODRAT**
NIK. 500059

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Untuk tambahan informasi :

(Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek)
(Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek)

Peraturan Menteri Keuangan No. 51/MPK/2016

Penjelasan :

Diisi berdasarkan contoh perhitungan PPh Ps.23 atas pemakaian kendaraan sewa.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

P W P : *diisi sesuai kartu NPWP*
 nama WP : KOPEGTEL CAMAR JEMBER
 alamat WP : JL.PB.SUDIRMAN NO.7 JEMBER

Kode Pos :

Kode Jenis Pajak (MAP) :
 Kode Jenis Setoran :
 Uraian Pembayaran *) : PPh Ps.23

isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I

Setoran : Masa
isi tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----

isi tanda silang pada kolom bulan setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun:
Diisi Tahun Pajak
setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : Tahun Final STP SKPKB SKPKBT
 / / / /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
isi sesuai pembayaran rupiah penuh

Rp622.440

Terbilang : (enamratus dua puluh duaribu empatratus empat
 Diisi dengan huruf *puluh rupiah.*)

Tempat Teraan
isi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Terima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
 Tanggal
 Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
 JEMBER Tgl. 03 Agustus 1999
 Cap dan tanda tangan

Nama Jelas

Nama Jelas **KODRAT**
 NIK. 500059

isi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

mbahan informasi :

(khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek

(khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

²DIP.5.1-98

Peringatan :

isi berdasarkan contoh perhitungan PPh Ps.23 atas pemakaian kendaraan sewa.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : *diisi sesuai kartu NPWP*
 Nama WP : KOPEGTEL CAMAR JEMBER
 Alamat WP : JL.PB.SUDIRMAN NO.7 JEMBER

Kode Pos :

Kode Jenis Pajak (MAP) :
 Kode Jenis Setoran :
 Uraian Pembayaran *) : PPh Ps.23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar!

Seloran : Masa
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Beri tanda silang pada kolom bulan setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak
setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : Tahun Final STP SKPKB SKPKBT
 / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi sesuai pembayaran rupiah penuh

Rp622.440

Terbilang : (.....enamratus.dua.puluh.duaribu.empatratus.empat.....
 Diisi dengan huruf puluh.rupiah.).....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
 Tanggal
 Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
 JEMBER Tgl. 03 Agustus 1999
 Cap dan tanda tangan

Nama Jelas

Nama Jelas **KODRAT**
 NIK. 500059

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

- Tambahan Informasi :**
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

KP.PDIP.5.1-98

eterangan :

Diisi berdasarkan contoh perhitungan PPh Ps.23 atas pemakaian kendaraan sewa.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : KOPEGTEL CAMAR JEMBER

Alamat WP : JL.PB.SUDIRMAN NO.7 JEMBER

Kode Pos :

Kode Jenis Pajak (MAP) :

Kode Jenis Setoran :

Uraian Pembayaran *) : PPh Ps.23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar!

Setoran : Masa

beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----

beri tanda silang pada kolom bulan setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud :

Nomor Ketetapan : Tahun Final STP SKPKB SKPKBT

/ / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran *Diisi sesuai pembayaran rupiah penuh*

Rp622.440

Terbilang : *(enamratus.dua.puluh.duaribu.empatratus.empat puluh rupiah.)*

Diisi dengan huruf

uang Teraan

iteriteria oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor JEMBER Tgl. 03 Agustus 1999 Cap dan tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas KODRAT NIK. 500059

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

P.PDIP.5.1-98

eterangan :

Diisi berdasarkan contoh perhitungan PPh Ps.23 atas pemakaian kendaraan sewa.